



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA WIJAYA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMANTAUAN**
3. NHK : **428128**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/204 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/94 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SERIBU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/94 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SERIBU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 407.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 14.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.121.000.000**

III. HUTANG **Rp. 650.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.471.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.